



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
NOMOR 436 TAHUN 2024 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN WALI KOTA TAHUN 2025

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1), Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Program Pembentukan Peraturan Wali Kota Tahun 2025;
- b. bahwa untuk memperhatikan usulan dan kebutuhan regulasi produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah dari beberapa Perangkat Daerah, maka Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 436 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Wali Kota Tahun 2025, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Nomor 436 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Wali Kota Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2024 tentang Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7045);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 5. Peraturan Daerah Kota Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan atas Keputusan Wali Kota Nomor 436 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Wali Kota Tahun 2025.
- KEDUA : Daftar Program Pembentukan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota Ini.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 12 Februari 2025

Pj. WALI KOTA CIREBON,



AGUS MULYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI
KOTA
NOMOR 436 TAHUN 2024 TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
WALI KOTA TAHUN 2025

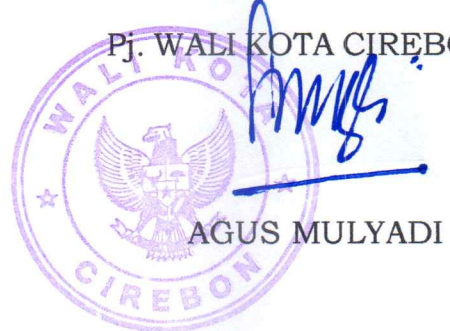
DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN WALI KOTA CIREBON
TAHUN 2025

NO	TENTANG	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA
1.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2026.	BAPPELITBANGDA
2.	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2025.	BAPPELITBANGDA
3.	Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.	BAPPELITBANGDA
4.	Teknis Pemberian Tunjangan Hari Rya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025	BPKPD
5.	Perubahan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 66 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.	BPKPD
6.	Pembebasan Retribusi dan Percepatan Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.	BPKPD
7.	Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	BPKPD
8.	Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026.	BPKPD
9.	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025.	BPKPD
10.	Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.	BPKPD
11.	Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan.	DLH
12.	Pedoman Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama..	DISDIK
13.	Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kota Cirebon.	DKIS
14.	Pengembangan Budaya Kerja dan Agen Perubahan.	Bagian Organisasi
15.	Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Tahun 2025-2029.	BPBD
16.	Rencana Kontingensi Penanggulangan Bencana Banjir Kota Cirebon Tahun 2024-2026.	BPBD
17.	Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	BPKPD
18.	Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.	DLH
19.	Pedoman Autentikasi Arsip Statis.	DISPUSIP
20.	Penyelenggaraan Koperasi Kelurahan Merah Putih.	DKUKMPP
21.	Tata Cara Kerjasama dan Investasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah.	DINKES
22.	Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cirebon.	DPRKP

23.	Penggunaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Bagi Tk Negeri, SD/MI Negeri, dan SMP/SMPT/MTs Negeri Kota Cirebon.	DISDIK
24.	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.	DISDUKCAPIL
25.	Rencana Strategis Kota Cirebon Tahun 2025-2029	BAPPELITBANGDA
26.	Perubahan Kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	BKPPD
27.	Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025.	BKPPD
28.	Pedoman Pola Hubungan Komunikasi Sandi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.	DKIS
29.	Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Cirebon.	DINKES
30.	Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS-PIMS Tahun 2024-2028.	DINKES
31.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pelindungan Penyandang Disabilitas.	DINSOS
32.	Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah RSD Gunung Jati.	RSD Gunung Jati Kota Cirebon
33.	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.	Bagian Pemerintahan
34.	Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Cirebon.	DPUTR
35.	Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD).	DPUTR
36.	Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kota Cirebon.	DPUTR
37.	Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik pada Pemerintahan Kota Cirebon.	DKIS
38.	Susunan Organisasi dan Tata kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon.	Bagian Perekonomian dan SDA
39.	Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Melalui Jalur Pelatihan.	BKPSDM
40.	Perubahan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.	BKPSDM
41.	Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan di Kota Cirebon.	DKPPP
42.	Jadwal Retensi Arsip.	DISPUSIP
43.	Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2025-2029.	
44.	Fasilitasi Distribusi Pangan Pokok Tertentu.	DKPPP
45.	Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon.	Bagian Kesejahteraan Rakyat
46.	Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak.	DP3APPKB
47.	Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.	BKPPD
48.	Pengelolaan Diseminasi Informasi Melalui Media Komunikasi Publik Pada Pemerintah Kota Cirebon.	DKIS
49.	Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kota Cirebon.	Bagian Organisasi
50.	Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan di Lingkungan Pemerintahan Kota Cirebon.	Bagian Organisasi
51.	Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Cirebon.	Bagian Organisasi
52.	Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kota Cirebon.	Bagian Organisasi

53.	Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintahan Kota Cirebon.	Bagian Organisasi
54.	Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintahan Kota Cirebon.	Bagian Organisasi
55.	Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 49 Tahun 2019 tentang Target Kinerja atas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Cirebon.	BPKPD
56.	Perubahan atas Perwal Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara.	BPKPD
57.	Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD.	BPKPD
58.	Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.	DLH
59.	Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.	BPKPD
60.	Dewan Kebudayaan	DISBUDPAR

Pj. WALI KOTA CIREBON,



AGUS MULYADI